

**POLA PENERTIBAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA SEKS DI
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**

DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

TESIS

Oleh:

ARINI ROBBI IZZATI

Nomor Mhs : 10912523

BKU : Hukum Hak Asasi Manusia

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 23 September 2016 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Tanggal... 10 Maret 2017

Anggota

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Tanggal... 6 Maret 2017

Anggota

Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

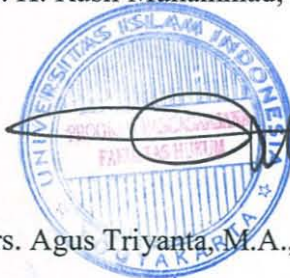
Tanggal... 6 Maret 2017

Mengetahui

Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanggal... 18 Maret 2017



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Tinjauan Pustaka	16
E. Kerangka Teori.....	23
F. Metode penelitian	27

BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI HUKUM FEMINIS

A Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia	33
1. Definisi dan Filosofi Hak Asasi Manusia	33
a. Teori Hukum Kodrati.....	34
b. Teori Positivisme atau Utilitarian	36
c. Teori Keadilan	38
2. Prinsip Hak Asasi Manusia	43
a. Prinsip Universal (<i>universality</i>).....	44
b. Prinsip Tak Terbagi	44
c. Prinsip Saling Bergantung	45
d. Prinsip Saling Terkait	45
e. Prinsip Kesetaraan	45

f. Prinsip Non-Diskriminasi.....	47
g. Tanggungjawab Negara (<i>state responsibility</i>).....	47
3. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	48
a. Kewajiban untuk Menghormati (<i>obligation to respect</i>).....	48
b. Kewajiban untuk Memenuhi (<i>obligation to fulfill</i>)	49
c. Kewajiban untuk Melindungi (<i>obligation to protect</i>)	49
4. Hukum Hak Asasi Manusia	50
B Perempuan dan Hak Asasi Manusia	53
1. Wajah Perempuan dalam Hak Asasi Manusia	53
2. Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia?	60
C Teori Hukum Feminis	63
1. Pengaruh Aliran Feminis terhadap Teori Hukum Feminis	63
2. Metode dalam Teori Hukum Feminis.....	67
3. Kritik Terhadap Netralitas dan Obyektivitas Hukum	70
BAB III PEMBAHASAN	
A Dasar Hukum Penertiban Perempuan Pekerja Seks di Wilayah Kota Yogyakarta.....	80
B Problem Dasar Hukum Penertiban Perempuan Pekerja Seks di Wilayah Kota Yogyakarta dalam Persepektif Hak Asasi Manusia.....	85
C Gambaran Umum Lokasi Prostitusi	93
1. Lokasi Pasar Kembang	94
2. Bong Suwong	101

D	Perempuan Pekerja Seks dalam Rupa-Rupa Penertiban	107
1.	Penertiban Model Konvensional	107
a.	Maksud dan Praktik Penertiban Model Konvensional	107
b.	Narasi Perempuan Pekerja Seks dalam Penertiban Model Konvensional.....	112
2.	Penertiban Model “Sample”	122
a.	Maksud dan Praktik Penertiban Model Sample	122
b.	Narasi Perempuan Pekerja Seks dalam Penertiban Model Sample	123
E.	Pola Penertiban Perempuan Pekerja Seks dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	131
BAB IV PENUTUP		144
DAFTAR PUSTAKA		148

